

RENJA '3PKPD

2023



BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini sesuai dengan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk transparansi dan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator serta menjadi gambaran bagi rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Penapatan Daerah pada Tahun 2023.

Demikian Rencana kerja ini kami susun dengan maksud dan tujuan yang mulia dan menjadi ikhtiar kami agar rencana kerja ini dapat terealisasi sesuai dengan target dan harapan kita bersama.

Ranai, Juli 2022

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah



SURYANTO, SE.,MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	8
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	10
2.4 Formulir Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	14
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	14
3.2 Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024	15
3.3 Sasaran Jangka Menengah BPKPD	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	25
BAB IV PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program dan Kegiatan Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7
Tabel 2.3	Pengukuran Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8
Tabel 2.4	Evaluasi Renja	11
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026.....	21

BAB I

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD yang telah disahkan. Dokumen Renja menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022. Renja berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Renja SKPD ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) BKD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna ini disusun dengan mengacu pada dokumen RKPD yang telah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65).
 13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 103);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 antara lain adalah:

1. Maksud:

- a. Menyediakan dokumen rencana teknis tahun 2023 sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026;
- b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja tahun 2023 secara tepat dan terukur.

2. Tujuan:

- a. Menjamin terlaksananya program dan kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan bidang keuangan secara terukur;
- b. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan, Tahunan serta LKjIP dan masukan bagi penyusunan LKPJ Kabupaten Natuna.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2023.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Bab V : Penutup, berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra memperlihatkan bahwa pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 39 (Tiga puluh Sembilan) Sub Kegiatan.

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pagu
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.519.046.068
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	405.042.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.130.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	354.912.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.529.758.068
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.529.758.068
	2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	891.200.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.200.000
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.293.700.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.300.000
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	299.346.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan	115.205.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	184.141.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	180.413.236.363,50
	1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.	1.830.350.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	625.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	618.650.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pagu
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	586.500.000
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	226.588.000
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	301.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	262.186.000
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.393.370.420
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	136.073.660
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.257.296.760
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	176.399.641.943,50
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	146.148.575.590,50
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	29.050.365.753
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.200.700.600
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.879.214.579
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.879.214.57
	Penyusunan Standar Harga	239.292.379
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	81.059.480
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	229.429.040
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	120.788.760
	Pengamanan Barang Milik Daerah	285.624.580
	Penilaian Barang Milik Daerah	200.000.000
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	84.638.580
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	343.600.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	194.781.760
TOTAL		194,811,497,010.50

Dari total pagu anggaran untuk 3 (tiga) Program) yaitu sebesar Rp194.811.479.010,50 terealisasi sebesar Rp150.727.970.342,35 atau hanya sebesar 78,17 persen. Berikut Tabel realisasi per program :

Tabel 2.2
Capaian Program Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.519.046.068	9.876.784.104	93.89
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	180.413.236.363.50	139.259.934.502,35	77.18
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.879.214.579	1.591.251.736	84,67
TOTAL		192,811,497,010.50	150.727.970.342,35	78.17

Rendahnya capaian indikator kinerja anggaran sebesar 78,17 persen bukanlah ukuran keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Tidak tercapainya target realisasi penyerapan anggaran tersebut tidak terlepas dari adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19 dan program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Meskipun capaian realiasi penyerapan anggaran masih dibawah target penyerapan, namun capaian Indikator Kinerja Utama IKU yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah TAHUN 2021 konsisten memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan opini tertinggi bagi hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD bagi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

ujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
Pencapaian Kinerja											100

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat

Daerah dan Badan Kabupaten Natuna yang kemudian direvisi dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan telah beberapakali mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi tata kerja dimana sebelum menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, pada tahun 2020 bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Potensi permasalahan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Proses perumusan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi serta telaah terhadap sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil telaahan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan isu strategis yang akan menjadi

prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun ke depan.

Dari beberapa permasalahan tersebut bisa ditarik **Isu Strategis** yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan pada perangkat daerah.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan pajak daerah.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program/kegiatan yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 tidak mengakomodasi usulan program/kegiatan masyarakat karena sebagai Badan yang merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.4. Formulir Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

Berikut Rincian Formulir Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna sebagai bahan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022.

TABEL 2.4
Evaluasi RKPD Tahun 2021

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten Natuna
Renja Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Natuna
Periode Pelaksanaan: Tahun 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang mengacu pada sasaran RKPD:

Indikator	Target
1. Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD□	95%
2. Keselarasan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	94%
3. Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	23%
4. Keselarasan Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah	85%
5. Kesesuaian Pencapaian Indikator Program dengan target indikator RPJMD yang telah dijabarkan	85%

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021-2020		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
					5		6		7		I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	4,A																							16
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																									
5.02.		KEUANGAN				*****	46.642.146.711		*****		*****	24.745.254.427		51.002.635.617		34.253.363.743											
01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/ Predikat	A / 80	21.900.265.972	85,96	18.618.831.228	80	10.518.916.068	81,27	2.036.295.690	81,27	2.500.201.955	80	2.764.975.347	80	2.453.554.972	322,54	9.755.027.964	403,18	92,74	409	*****	100,00	129,56	
2.01.		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/ Predikat	A / 80	821.200.000	85,96	253.356.206	80	404.912.000	81,27	75.780.000	81,27	129.918.400	80	91.315.200	80	70.222.200	322,54	367.235.800	403,18	90,70	409	620.592.006	100,00	75,57	
01		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	180.000.000	3	180.000.000	3	50.000.000	0,00	-	1	23.815.600	0	2.000.000	2	22.674.200	3	48.489.800	100,00	96,98	6	228.489.800	200,00	126,94	
06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Laporan	15	641.200.000	12	73.356.206	3	354.912.000	0	75.780.000	0	106.102.800	0	89.315.200	3	47.548.000	3	318.746.000	100,00	89,81	15	392.102.206	100,00	61,15	
2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu pembayaran administrasi umum perangkat daerah	persen	60	9.156.315.972	48	5.903.200.164	12	7.529.758.068	3	1.626.557.904	3	1.789.023.059	3	2.166.615.899	3	1.666.186.668	12	7.248.383.530	100,00	96,26	60	*****	100,00	143,63	
01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	bulan	60	9.156.315.972	48	5.903.200.164	12	7.529.758.068	3	1.626.557.904	3	1.789.023.059	3	2.166.615.899	3	1.666.186.668	12	7.248.383.530	100,00	96,26	60	13.151.583.694	100,00	143,63	
2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	600.000.000	48	292.150.000	12	100.000.000	3	21.810.000	3	23.154.000	3	23.111.000	3	29.874.000	12	97.949.000	100,00	97,95	60	390.099.000	100,00	65,02	
07.		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	Bulan	60	600.000.000	48	292.150.000	12	100.000.000	3	21.810.000	3	23.154.000	3	23.111.000	3	29.874.000	12	97.949.000	100,00	97,95	60	390.099.000	100,00	65,02	
2.06.		Administrasi Perangkat Daerah		Persen	75	6.682.250.000	42,55	6.418.584.822	75	891.200.000	42,55	122.733.910	49,76	190.682.216	75	126.655.748	75	223.994.077	242,31	664.065.951	323,08	74,51	285	7.082.650.773	379,81	105,99	
02.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	160	1.207.250.000	133	1.236.105.600	26	215.000.000	0	-	0	0	0	-	19	95.000.000	19,00	95.000.000	73,08	44,19	152	1.331.105.600	95,00	110,26	
03.		Penyediaan bahan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	bulan	60	500.000.000	48	102.512.000	12	80.000.000	3	17.800.000	3	19.800.000	3	20.800.000	3	20.800.000	12,00	79.200.000	100,00	99,00	60	181.712.000	100,00	36,34	
04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor	bulan	60	625.000.000	48	415.355.000	12	87.000.000	3	7.250.000	3	4.500.000	3	8.500.000	12,00	20.250.000	100,00	23,28	60	435.605.000	100,00	69,70			
05.		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	bulan	60	875.000.000	48	820.958.500	12	145.000.000	3	34.268.000	3	36.713.000	3	37.729.000	3	35.573.000	12,00	144.283.000	100,00	99,51	60	965.241.500	100,00	110,31	
06.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	175.000.000	48	107.344.400	12	20.000.000	3	-	3	3	3	9.500.000	3	7.200.000	12,00	16.700.000	100,00	83,50	60	124.044.400	100,00	70,88	
07.		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kali	360	3.300.000.000	363	3.736.309.322	72	344.200.000	13	63.415.910	13	134.169.216	20	54.126.748	23	56.921.077	69,00	308.632.951	95,83	89,67	432	4.044.942.273	120,00	122,57	
2.08.		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	60	3.397.000.000	48	4.574.656.234	12	1.293.700.000	3	180.841.000	3	315.839.000	3	334.466.500	3	329.376.392	12,00	1.160.522.892	100,00	89,71	60	5.735.179.126	100,00	168,83	
01.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	60	225.000.000	48	152.662.000	12	25.000.000	3	6.291.000	3	5.940.000	3	5.940.000	3	5.940.000	12,00	24.111.000	100,00	96,44	60	176.773.000	100,00	78,57	
02.		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	766.000.000	48	985.932.834	12	650.400.000	3	40.000.000	3	175.349.000	3	193.976.500	3	182.921.000	12,00	592.246.500	100,00	91,06	60	1.578.179.334	100,00	206,03	
04.		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah PTT	orang	37	2.406.000.000	37	3.436.061.400	37	618.300.000	37	134.550.000	37	134.550.000	37	134.550.000	37	140.515.392	148,00	544.165.392	400,00	88,01	185	3.980.226.792	500,00	165,43	
2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	persen	75	1.243.500.000	75	1.176.883.802	75	299.346.000	17,27	8.572.876	28,50	51.585.280	75	22.811.000	75	133.901.635	195,77	216.870.791	261,03	72,45	271	1.393.754.593	361,03	112,08	
02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	8	330.000.000	8	478.252.302	8	115.205.000	8	6.284.876	8	10.927.280	8	11.628.000	8	7.846.635	32,00	36.686.791	400,00	31,84	40	514.939.093	500,00	156,04	
09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanyan dan penyediaan gedung kantor lainnya	Gedung	1	913.500.000	1	698.631.500	1	184.141.000	1	2.288.000	1	40.658.000	1	11.183.000	1	126.055.000	4,00	180.184.000	400,00	97,85	5	878.815.500	500,00	96,20	
02.		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu dala penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	*****	Tepat Waktu	21.618.606.501	Tepat Waktu	*****	Tepat Waktu	*****	Tepat Waktu	21.896.230.878	Tepat Waktu	47.740.126.270	Tepat Waktu	31.453.269.624	Tepat Waktu	111.879.535.549	Tepat Waktu	62,01	Tepat Waktu	133.498.142.050	Tepat Waktu	86,06	
2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu dala penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	7.519.911.000	Tepat Waktu	9.881.667.987	Tepat Waktu	1.830.350.000	Tepat Waktu	64.151.527	Tepat Waktu	242.551.900	Tepat Waktu	414.579.500	Tepat Waktu	555.547.093	Tepat Waktu	1.276.830.020	Tepat Waktu	69,76	Tepat Waktu	11.158.498.007	Tepat Waktu	148,39	

07.		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd	Ketepatan waktu dalam penetapan APBD	PERDA	5	3.866.011.000	4	5.246.212.419	1	625.200.000	0	6.160.000	0	18.160.000	0	206.670.000	1	90.942.600	1,00	321.932.600	100,00	51,49	5	5.568.145.019	100,00	144,03
08.		Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd	Ketepatan waktu dalam penetapan Perubahan APBD	PERDA	5	3.100.000.000	4	4.635.455.568	1	618.650.000	0	25.303.300	0	15.000.000	1	93.800.000	0	364.639.175	1,00	498.742.475	100,00	80,62	5	5.134.198.043	100,00	165,62
11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Keuangan Belanja Daerah	Bulan	12	553.900.000			12	586.500.000	3	32.688.227	3	209.391.900	3	114.109.500	3	99.965.318	12,00	456.154.945	100,00	77,78	12	456.154.945	100,00	82,35
2.02		Koordinasi dan Pegelolaan Perbendaharaan Daerah	Terbitnya administrasi Keuangan Daerah	Bulan	60	7.805.236.000	48	9.361.996.569	12	789.874.000	3	130.288.000	3	255.665.944	3	180.302.542	3	94.018.370	12,00	660.274.856	100,00	83,59	60	10.022.271.425	100,00	128,40
01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	Kali	20	2.346.012.000	16	2.792.681.511	4	226.588.000	1	27.157.000	1	83.042.000		56.494.000		29.831.570	2,00	196.524.570	50,00	86,73	18	2.989.206.081	90,00	127,42
05.		Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, su pervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	Kegiatan	5	3.020.360.000	4	4.658.623.003	1	301.100.000	1	57.526.000	1	61.084.000	1	63.172.000	1	30.891.000	4,00	212.673.000	400,00	70,63	8	4.871.296.003	160,00	161,28
07.		Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran kas daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Peny etoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Daftar Transaksi harian (DTH), Pelayanan pengajuan Peny ediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	Bulan	60	2.438.864.000	48	1.910.692.055	12	262.186.000	3	45.605.000	3	111.539.944	3	60.636.542	3	33.295.800	12,00	251.077.286	100,00	95,76	60	2.161.769.341	100,00	88,64
2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Opini Audit BPK	Opini	WTP	2.861.100.000	WTP	2.374.941.945	WTP	1.393.370.420	WTP	309.343.100	WTP	338.036.200	WTP	316.924.200	WTP	278.857.500	WTP	1.243.161.000	WTP	89,22	WTP	3.618.102.945	WTP	126,46
01.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan koordinasi akutansi penerimaan dan pengeluaran kas	OPD	45	1.331.300.000	45	1.469.899.849	45	136.073.660	45	26.754.000	45	32.086.600	45	24.074.000	45	24.829.200	180,00	107.743.800	400,00	79,18	225	1.577.643.649	500,00	118,50
03.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulan, Triwulan dan Semesteran	Laporan realisasi anggaran	Laporan	5	1.529.800.000	4	905.042.096	1	1.257.296.760	0	282.589.100	0	305.949.600	0	292.850.200	1	254.028.300	1,00	1.135.417.200	100,00	90,31	5	2.040.459.296	100,00	133,38
2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pelayanan penyaluran dan pengelolaan keuangan daerah	Bulan	60	#####	48	-	12	#####	3	#####	3	21.059.976.834	3	#####	3	#####	12,00	#####	100,00	61,62	60	#####	100,00	79,38
08.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah bulan Penyaluran Bantuan Keuangan	Bulan	60	125.692.203.000	12	-	12	146.148.575.590,50	3	9.875.003.850	3	19.565.640.400	3	39.374.944.300	3	28.139.547.100	12,00	96.955.135.650	100,00	66,34	24	96.955.135.650	40,00	77,14
09.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kegiatan Darurat dan Mendesak	kegiatan	5	10.000.000.000	1	-	1	29.050.365.753	1	411.122.300	1	994.056.444	1	7.453.375.728,35	1	2.385.299.561	4,00	11.243.854.033	400,00	38,70	5	11.243.854.033	100,00	112,44
10.		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dana bagi hasil kabupaten	kegiatan	1	1.250.700.000	1	-	1	1.200.600.700	1	-	1	500.279.990	1	-	1	-	4,00	500.279.990	400,00	41,67	5	500.279.990	500,00	40,00
03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Persen	50	7.854.039.140	50	6.404.708.982	65	1.987.752.200	45	251.873.000	45	348.821.594	65	497.534.000	65	346.539.147	65,00	1.444.767.741	100,00	72,68	115	7.849.476.723	230,00	99,94
2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	Persen	50	7.854.039.140	50	6.404.708.982	65	1.987.752.200	45	251.873.000	45	348.821.594	65	497.534.000	65	346.539.147	65,00	1.444.767.741	100,00	72,68	115	7.849.476.723	230,00	99,94
01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga	dokumen	5	1.568.584.000	4	1.379.189.416	1	348.200.000	0	44.050.000	1	42.700.000	0	49.400.000	0	72.450.000	1,00	208.600.000	100,00	59,91	5	1.587.789.416	100,00	101,22
02		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	5	200.000.000	4	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	-	0,00	0,00	4	-	80,00	0,00	
03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dokumen	dokumen	5	1.062.464.000	4	584.546.200	1	81.059.480	0	-	0	23.310.000	0	8.000.000	1	33.340.000	1,00	64.650.000	100,00	79,76	5	649.196.200	100,00	61,10
05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan penatausahaan barang milik daerah	bulan	24	371.937.140	12	-	12	229.429.040	3	32.778.000	3	55.559.000	3	48.896.000	3	45.192.000	12,00	182.425.000	100,00	79,51	24	182.425.000	100,00	49,05
06		Inv entarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen inv etaris Barang Daerah	Dokumen	5	150.000.000	4	-	1	120.778.760	0	-	0	17.290.000	0	53.100.000	1	24.476.000	1,00	94.866.000	100,00	78,55	5	94.866.000	100,00	63,24
07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan monitoring Barang Milik Daerah	Laporan	5	254.500.000	4	-	1	285.264.580	0	3.000.000	0	38.393.000	0	43.250.000	1	104.721.147	1,00	189.364.147	100,00	66,38	5	189.364.147	100,00	74,41
08		Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian aset dalam pemberlakuan pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan	5	782.440.000	4	999.292.207	1	200.000.000	0	-	0	-	0	166.995.400	1	-	1,00	166.995.400	100,00	83,50	5	1.166.287.607	100,00	149,06
09		Pengaw asan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah validasi data laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00

09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah validasi data laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
10		Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersedian Data BMD yang Akuntabel	Bulan	1	1.292.070.000	0	1.136.363.290	1	184.638.580	0	5.000.000	0	46.820.300	0	38.143.600	1	27.680.000	1,00	117.643.900	100,00	63,72	1	1.254.007.190	100,00	97,05	
11		Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi data aset	Kali	5	1.372.044.000	4	1.664.311.945	1	343.600.000	0	133.015.000	0	56.110.400	0	78.749.000	1	35.600.000	1,00	303.474.400	100,00	88,32	5	1.967.786.345	100,00	143,42	
12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan mutasi barang milik daerah	Laporan	5	800.000.000	5	641.005.924	1	194.781.760	0	34.030.000	0	68.638.894	0	11.000.000	1	3.080.000	1,00	116.748.894	100,00	59,94	6	757.754.818	120,00	94,72	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				845,49	421,11			845,09	585,82		
Predikat Kinerja																					T	T			T	T	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna*):																											

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026

Isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance*. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi dan kemajauan serta keterbukaan informasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Renstra BPKPD Kabupaten Natuna disusun dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan pendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*);
7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna terkait di misi ke-6 yaitu “menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)” dan sasaran yang ingin dicapai yaitu “Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.

3.2 Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah **Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan** untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “**Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”.

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, *redistribusi* pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal.

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif • Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ▪ Kinerja dan kualitas pelayanan aparatur masih kurang ▪ Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan regulasi dari pemerintah yang belum lengkap • Pembangunan SIPD yang belum sempurna 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mendukung • Tersedianya regulasi pengelolaan keuangan daerah

	<p>efektif, efisien, dan akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial • Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali 	<p>evaluasi dan pelaporan kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya SDM pengelolaan keuangan daerah ▪ Belum optimalnya pengelolaan perencanaan dan penganggaran dengan baik sehingga banyaknya usulan pergeseran dengan DPA yang ditetapkan ▪ Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD); ▪ Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian tim asistensi/verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ▪ Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan masih terjadi kesalahan pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh OPD ▪ Data Wajib Pajak dan Potensi Pajak yang belum akurat ▪ Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal ▪ Mekanisme pencatatan Aset/barang milik daerah yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan OPD yang tidak tepat waktu • Tata kelola BMD belum optimal • Perubahan <i>mindset</i> dan <i>culture set</i> pegawai membutuhkan proses dan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari BPK untuk WTP • Adanya program RENAKSI KPK untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, aset dan pendapatan daerah • Adanya reward dan punishment terhadap tata kelola pengelolaan keuangan daerah • Komitmen SDM yang mendukung untuk peningkatan kinerja
--	---	---	---	--

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan Jangka Menengah BPKPD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui usaha pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yaitu hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan pada hakekatnya mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima, Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel serta Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

3.3 Sasaran Jangka Menengah BPKPD

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan

secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah;
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator serta target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun ke-					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima	Indeks pelayanan publik	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50
2.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai LAKIP	81,25	81,50	81,75	81,85	81,90
3.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	79,125	79,225	79,325	79,455	79,525	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
									Rasio Efektifitas Pajak Daerah	92	94	96	98	100
									Rasio Pengelolaan BMD	80	85	90	95	100

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan

- a. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- c. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- d. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan :

b. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Kegiatan :

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- c. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- b. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- c.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

4. Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
7. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan :

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- d. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- e. Penagihan Pajak Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam peningkatan pendapatan asli Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 tertuang dalam Lampiran I (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024).

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sehingga dapat bertanggung dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Penapatan Daerah melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan keuangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain.

TABEL T-V.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH												
KODE	PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
01.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah								142.803.249.250	146.247.668.250		
05.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								142.803.249.250	146.247.668.250		
05.02	KEUANGAN								142.803.249.250	146.247.668.250		
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJP	81.50.00			358.419.000	358.419.000		
05.02.01.01.	KABUPATEN/KOTA											
05.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	85.50.00	358.419.000	358.419.000		
05.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	110.129.000	110.129.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Natuna				2	110.129.000	110.129.000		
05.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	50.000.000	50.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kabupaten Natuna				1	50.000.000	50.000.000		
05.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	20.000.000	20.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Natuna				1	20.000.000	20.000.000		
05.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	50.000.000	50.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Kabupaten Natuna				1	50.000.000	50.000.000		
05.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	20.000.000	20.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Natuna				1	20.000.000	20.000.000		
05.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	83.290.000	83.290.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Natuna				4	83.290.000	83.290.000		
05.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	25.000.000	25.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Natuna				1	25.000.000	25.000.000		
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN BUKUJAN ADMINISTRASI	85			16.798.959.614	16.257.251.444		
05.02.01.2.02.	KABUPATEN/KOTA				KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP							
05.02.01.2.02.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	11.538.001.444	11.525.551.444		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	11.300.010.000	11.300.010.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Natuna				77	11.300.010.000	11.300.010.000		
05.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	9.541.444	9.541.444		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kabupaten Natuna				1	9.541.444	9.541.444		
05.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	26.000.000	26.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kabupaten Natuna				12	26.000.000	26.000.000		
05.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	70.000.000	70.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kabupaten Natuna				3	70.000.000	70.000.000		
05.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	22.450.000	10.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Natuna				1	22.450.000	10.000.000		
05.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	50.000.000	50.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			Kabupaten Natuna				1	50.000.000	50.000.000		
05.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	50.000.000	50.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kabupaten Natuna				1	50.000.000	50.000.000		
05.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.000.000	10.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kabupaten Natuna				1	10.000.000	10.000.000		
05.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	80	15.000.000	15.000.000		
05.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000	10.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kecamatan Bunguran Timur				1	10.000.000	10.000.000		
05.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	5.000.000	5.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kabupaten Natuna				12	5.000.000	5.000.000		
05.02.01.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Persentase Pendapatan Daerah	80	60.100.000	60.100.000		
05.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	100	100		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			Kabupaten Natuna				1	100	100		
05.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	40.000.000	40.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Analisa serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			Kabupaten Natuna				1	40.000.000	40.000.000		
05.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	10.000.000	10.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			Kabupaten Natuna				1	10.000.000	10.000.000		

5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	10,000,000	10,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000		
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	175,000,000	175,000,000		
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	165	100,000,000	100,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kabupaten Natuna			1	100,000,000	100,000,000		
5.02.01.2.06.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	75,000,000	75,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Natuna			5	75,000,000	75,000,000		
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	55	1,038,258,170	944,000,000		
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	204,000,000	204,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Peralapah			Kabupaten Natuna			12	144,000,000	144,000,000		
	Belanja Peralatan Jaringan Komputer			Kabupaten Natuna			1	60,000,000	60,000,000		
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	30,000,000	30,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Peralatan rumah tangga			Kabupaten Natuna			12	30,000,000	30,000,000		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	90,000,000	90,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Natuna			12	90,000,000	90,000,000		
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	80,000,000	80,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Natuna			12	80,000,000	80,000,000		
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60	50,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kabupaten Natuna			60	50,000,000	50,000,000		
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan-Material					Jumlah Paket Bahan-Material yang Disediakan	12	90,000,000	90,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Bahan/Material			Kabupaten Natuna			12	90,000,000	90,000,000		
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	444,258,170	350,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rapat Koordnasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Natuna			36	444,258,170	350,000,000		
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	50,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kabupaten Natuna			3	50,000,000	50,000,000		
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	60	1,138,000,000	1,138,000,000		
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	830,000,000	830,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2			Kabupaten Natuna			2	30,000,000	30,000,000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4			Kabupaten Natuna			2	800,000,000	800,000,000		
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	100,000,000	100,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Belanja Modal Kursi rapat			Kabupaten Natuna			20	60,000,000	60,000,000		
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat			Kabupaten Natuna			4	40,000,000	40,000,000		
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	188,000,000	178,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Belanja Modal AC/pendingin ruangan			Kabupaten Natuna			3	18,000,000	18,000,000		
	Belanja Modal Laptop/Notebook			Kabupaten Natuna			5	80,000,000	80,000,000		
	Belanja Modal Mesin Printer			Kabupaten Natuna			3	15,000,000	15,000,000		
	Belanja Modal mesin scanner			Kabupaten Natuna			6	30,000,000	20,000,000		
	PC			Kabupaten Natuna			5	30,000,000	30,000,000		
	UPS			Kabupaten Natuna			5	15,000,000	15,000,000		
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2	10,000,000	10,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Belanja Modal Gorden/tra jendela			Kabupaten Natuna			10	10,000,000	10,000,000		
5.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	10,000,000	10,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengadaan aplikasi			Kabupaten Natuna			2	10,000,000	10,000,000		
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	1,659,600,000	1,659,600,000		
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1,659,600,000	1,659,600,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Natuna			12	1,659,600,000	1,659,600,000		
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	735,000,000	500,000,000		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	50,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Belanja Material, Benda Pos Lainnya			Kabupaten Natuna			12	50,000,000	50,000,000		
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	685,000,000	450,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kabupaten Natuna			12	685,000,000	450,000,000		
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	90	440,000,000	250,000,000		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	70,000,000	40,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Natuna			17	70,000,000	40,000,000		
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel					Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	10,000,000	10,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Mebel			Kabupaten Natuna			5	10,000,000	10,000,000		
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	30,000,000	30,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Natuna			10	30,000,000	30,000,000		
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3	20,000,000	20,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Kabupaten Natuna			3	20,000,000	20,000,000		
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	10,000,000	10,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000		
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Natuna		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2	200,000,000	110,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi			Kabupaten Natuna			2	200,000,000	110,000,000		
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Natuna		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2	100,000,000	30,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Natuna			2	100,000,000	30,000,000		
06.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	100		119,763,696.63%	124,047,907.80%		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					Persentase Petyayan Perbendaharaan Tepat Waktu	100	1,689,000,000	1,099,000,000		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1	300,000,000	250,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kabupaten Natuna			1	300,000,000	250,000,000		
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	50,000,000	20,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kabupaten Natuna			1	50,000,000	20,000,000		
5.02.02.2.02.03	Penyusunan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1	50,000,000	20,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan			Kabupaten Natuna			1	50,000,000	20,000,000		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembayaan Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1	100,000,000	20,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penatausahaan Pembayaan Daerah			Kabupaten Natuna			1	100,000,000	20,000,000		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	600,000,000	300,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kabupaten Natuna			12	600,000,000	300,000,000		
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1	100,000,000	100,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Kabupaten Natuna			1	100,000,000	100,000,000		
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK)					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK)	12	300,000,000	200,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pehitungan Pihak Ketiga (PFK)			Kabupaten Natuna			12	300,000,000	200,000,000		
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Putang dan Utang Daerah yang Timbul					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Putang dan Utang Daerah yang Timbul	1	100,000,000	100,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang Timbul			Kabupaten Natuna			1	100,000,000	100,000,000		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas APBD dengan Instansi Terkait					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas APBD dengan Instansi Terkait	1	20,000,000	20,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas APBD dengan Instansi Terkait			Kabupaten Natuna			1	20,000,000	20,000,000		
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	19,000,000	19,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub			Kabupaten Natuna			1	19,000,000	19,000,000		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47	50,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Bimbingan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna			47	50,000,000	50,000,000		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	92	1,820,000,000	1,200,000,000		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	250,000,000	250,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Kabupaten Natuna			12	250,000,000	250,000,000		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Utang, dan Beban					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Utang, dan Beban	12	180,000,000	70,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Utang, dan Beban			Kecamatan Bunguran Timur			12	180,000,000	70,000,000		
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	400,000,000	400,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kabupaten Natuna			12	400,000,000	400,000,000		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	90,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			Kabupaten Natuna			12	90,000,000	50,000,000		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	120,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna			2	120,000,000	50,000,000		
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	100,000,000	100,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban			Kabupaten Natuna			1	100,000,000	100,000,000		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	1	220,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan			Kabupaten Natuna			1	220,000,000	50,000,000		
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	50,000,000	50,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kabupaten Natuna			1	50,000,000	50,000,000		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	80,000,000	40,000,000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

	Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah		Kabupaten Natuna			1	80,000,000	40,000,000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	150,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.11	System dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna			1	150,000,000	20,000,000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Kabupaten Natuna		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50	100,000,000	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pelatihan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Kabupaten Natuna			50	100,000,000	40,000,000	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Kabupaten Natuna		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1	40,000,000	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan BLUD Kabupaten/Kota		Kabupaten Natuna			1	40,000,000	40,000,000	
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	40,000,000	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah		Kabupaten Natuna			1	40,000,000	40,000,000	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10	116,254,696,639	121,748,907,806	
5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Kecamatan Bunguran Timur		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		Kecamatan Bunguran Timur			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyerahan Pinjaman Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyerahan Pinjaman Pemerintah Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyerahan Pinjaman Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah		Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyerahan Kembali Pinjaman Daerah		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyerahan Kembali Pinjaman Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penyerahan Kembali Pinjaman Daerah		Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		Kabupaten Natuna			1	10,000,000	10,000,000	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	4	105,659,596,639	111,153,807,806	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan		Kabupaten Natuna			4	105,659,596,639	111,153,807,806	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	9,500,000,000	9,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Kabupaten Natuna			1	9,500,000,000	9,500,000,000	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota		Kabupaten Natuna		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4	1,025,100,000	1,025,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Kabupaten Natuna			4	1,025,100,000	1,025,100,000	
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/RP YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI	94	2,607,674,000	2,620,000,000		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Penetapan APBD	1	2,607,674,000	2,620,000,000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	50,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS		Kabupaten Natuna			1	50,000,000	20,000,000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Kabupaten Natuna		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	30,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Kabupaten Natuna			1	30,000,000	20,000,000	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Kabupaten Natuna		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	50,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Verifikasi RKA-SKPD		Kabupaten Natuna			1	50,000,000	20,000,000	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Kabupaten Natuna		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	30,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Kabupaten Natuna			1	30,000,000	20,000,000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Kabupaten Natuna		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	50,000,000	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Verifikasi DPA-SKPD		Kabupaten Natuna			1	50,000,000	50,000,000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Kecamatan Bunguran Timur		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	50,000,000	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Verifikasi DPA-SKPD Perubahan		Kecamatan Bunguran Timur			1	50,000,000	50,000,000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kecamatan Bunguran Timur		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1	775,337,000	1,200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kecamatan Bunguran Timur			1	775,337,000	1,200,000,000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kabupaten Natuna		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	742,602,000	700,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kabupaten Natuna			1	742,602,000	700,000,000	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Kabupaten Natuna		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	20,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Kabupaten Natuna			1	20,000,000	20,000,000	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Kabupaten Natuna		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	100,000,000	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Kabupaten Natuna			4	100,000,000	100,000,000	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Kecamatan Bunguran Timur		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	10	589,735,000	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Kecamatan Bunguran Timur			10	589,735,000	300,000,000	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran		Kabupaten Natuna		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran	1	20,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaran		Kabupaten Natuna			1	20,000,000	20,000,000	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kecamatan Bunguran Timur		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47	100,000,000	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah		Kecamatan Bunguran Timur			47	100,000,000	100,000,000	

05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	MANAJEMEN ASET	83		2,379,500,000	2,159,090,000		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					Persentase BMD yang sesuai dengan RKBM	100	649,500,000	949,500,000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga					Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	150,000,000	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Standar Harga		Kabupaten Natuna				1	150,000,000	250,000,000	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	170,000,000	270,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	170,000,000	270,000,000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Pencapaian Kebutuhan Barang Milik Daerah					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	180,000,000	180,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				2	180,000,000	180,000,000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	149,500,000	249,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	149,500,000	249,500,000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	77	1,730,000,000	1,209,590,000	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	100,000,000	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	100,000,000	100,000,000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	300,000,000	250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	300,000,000	250,000,000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	380,000,000	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		Kecamatan Bunguran Timur				1	380,000,000	150,000,000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	100,000,000	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	100,000,000	100,000,000	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	100,000,000	49,590,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	100,000,000	49,590,000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemertanatan, Pemindahgugahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertanatan, Pemindahgugahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	250,000,000	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertanatan, Pemindahgugahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				1	250,000,000	200,000,000	
5.02.03.2.01.11	Rasionalisasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	300,000,000	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				4	300,000,000	200,000,000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	50,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Barang Milik Daerah		Kabupaten Natuna				2	50,000,000	10,000,000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47	100,000,000	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kecamatan Bunguran Timur				47	100,000,000	100,000,000	
06.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	5		885,000,000	805,000,000		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					Persentase Penyerahan Sektor Pajak Daerah	6	885,000,000	805,000,000	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	20,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1	20,000,000	20,000,000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	30,000,000	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1	30,000,000	50,000,000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	60,000,000	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1	60,000,000	60,000,000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	300,000,000	420,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pengadaan Billboard		Kabupaten Natuna				1	100,000,000	120,000,000	
	Pengadaan Videotron		Kabupaten Natuna				1	200,000,000	300,000,000	
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1365	30,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1365	30,000,000	20,000,000	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	20,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				2	20,000,000	20,000,000	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi NJOP nya	2	20,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Data Objek Pajak yang Disevaluasi NJOP nya		Kabupaten Natuna				2	20,000,000	20,000,000	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44699	40,000,000	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				44699	40,000,000	25,000,000	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1	10,000,000	10,000,000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2	60,000,000	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		Kecamatan Bunguran Timur				2	60,000,000	60,000,000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1365	175,000,000	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1365	175,000,000	20,000,000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1	10,000,000	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Kabupaten Natuna				1	10,000,000	10,000,000	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1365	50,000,000	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		Kecamatan Bunguran Timur				1365	50,000,000	50,000,000	

5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	30.000.000	10.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Kabupaten Natuna			1	30.000.000	10.000.000		
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1	40.000.000	10.000.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			Kabupaten Natuna			1	40.000.000	10.000.000		
JUMLAH								142.803.249.250	146.247.666.250		

Ranai, 09 Desember 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

SURYANTO, SE, MA

NIP. 19770912 200012 1 004